

PENGARUH TINGKAT UPAH MINIMUM, PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN PERBATASAN DAN PESISIR DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Dini Nuzulianti

B2052211034@student.untan.ac.id

Abstract

The purpose of this study is to test and analyze: 1) The effect of minimum wages, PMDN, capital expenditures on the unemployment rate in Border and Coastal Districts, West Kalimantan Province; 2) The Effect of Minimum Wage, PMDN, Capital Expenditure, Unemployment Rate on Economic Growth in Border and Coastal Districts of West Kalimantan Province. The approach used is a quantitative approach and associative type. The type of data is panel data type, analysis using path analysis (Path Analysis). Conclusion: 1) UMK has a positive and significant effect on the unemployment rate in Border Districts and Coastal Districts; 2) PMDN and Capital Expenditure have no significant effect on the Unemployment Rate in Border and Coastal Regencies; 3) UMK has no effect on Economic Growth in Border Districts, but in Coastal Districts it has a significant and negative effect; 4) PMDN, Capital Expenditure, Unemployment Rate have no significant effect on Economic Growth in Border and Coastal Regencies in West Kalimantan Province.

Keywords: Minimum Wage, PMDN, Government Spending, Unemployment, and Economic Growth

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisa: 1) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat; 2) Pengaruh Upah Minimum, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir Provinsi Kalimantan Barat. Pendekatan yang digunakan pendekatan kuantitatif dan jenis assosiatif. Jenis data adalah jenis data panel, analisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Kesimpulan: 1) UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir; 2) PMDN maupun Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir; 3) UMK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan, tetapi di Kabupaten Pesisir berpengaruh signifikan dan negatif; 4) PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan dan Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.

Keywords: Upah Minimum, PMDN, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah stabilitas makroekonomi yang perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan sesuai dengan salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kombinasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi

berbagai permasalahan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kinerja perekonomian negara sebagai kunci dari tolok ukur kesejahteraan masyarakat.

Sementara indikator makro ekonomi yang menjadi perhatian serius di setiap daerah adalah Pengangguran. Berbagai Kebijakan terus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga dan menanggulangi angka pengangguran. Pengendalian Pengangguran harus menjadi perhatian utama dan merupakan tugas berat, sehingga penanganannya tidak harus dilakukan pada saat sudah terjadi dan menjadi isu nasional. Jika hal ini terjadi maka akan menjadi rumit mengatasinya tidak diantisipasi sebelumnya (Muhdar, 2015). Pengangguran bisa timbul karena masalah ekonomi maupun karena masalah kependudukan. Pengangguran tidak hanya berdampak pada permasalahan perekonomian negara atau daerah saja tetapi lebih luas akan dampak sosial masyarakat. Pengangguran berkorelasi langsung pada kesejahteraan masyarakat, karena pengangguran mempengaruhi manusia secara langsung. Menurut Mankiw (2007), pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang berpengaruh langsung terhadap manusia yaitu menurunkan standar kehidupan atau kesejahteraan dan menimbulkan tekanan psikologis.

Pengangguran juga erat kaitan dengan Tingkat Upah yang diterima oleh pekerja. Semakin tinggi upah yang diterima maka daya beli suatu penduduk akan meningkat, dengan demikian kesejahteraan penduduk akan meningkat. Agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu tajam terhadap upah yang diterima oleh tenaga kerja, pemerintah daerah bersama organisasi terkait seperti Pengusaha dan Serikat Buruh membuat kebijakan tentang penetapan Upah Minimum.

Salah satu peranan Utama dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat dua keuntungan berinvestasi terutama di sektor barang modal, yaitu peningkatan jumlah produksi dan kesempatan kerja (Buana, Saragih & Aritonang, 2018). Iklim Investasi yang berkembang dengan baik serta kompetitif diharapkan dapat mempercepat perkembangan tingkat investasi yang dapat saling menguntungkan dalam membangun suatu daerah.

Peningkatan aktivitas perekonomian dapat dicapai pemerintah daerah dengan meningkatkan anggaran belanja langsung terutama belanja modal. Pengalokasian belanja modal dapat dimasukkan dalam pembangunan sarana dan prasarana serta untuk perbaikan infrastruktur public yang diharapkan intensitas aktivitas ekonominya dapat ditingkatkan yang kemudian menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Setiap pembangunan yang dilakukan negara berkembang (*Developing Countries*) berorientasi pada meningkatnya pendapatan perkapita pada dasarnya berupaya menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran maupun ketimpangan pendapatan, karena pembangunan tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik suatu negara tetapi berkaitan dengan perubahan mental (*state of mind*) (Todaro dan Smith, 2011).

Teori Klasik Adam Smith

Menurut Adam Smith bahwa perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah karena adanya spesialisasi akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda – beda. Perbedaan ini yang membuat manusia tidak menguasai semua bidang karena pasti ada salah satu bidang yang dikuasai. Karena spesialisasi inilah, sebuah pekerjaan akan lebih maksimal hasilnya karena tenaga kerjanya orang- orang yang ahli dibidangnya masing – masing. Selain itu, Adam Smith menitik beratkan pada luasnya pasar. Pasar yang sempit akan membatasi spesialisasi (*Devition of labour*) dan tentu kita ingin tenaga kerja kita bekerja dengan maksimal dengan memperkerjakan mereka sesuai bidangnya atau spesialisasinya. Oleh karena itu pasar harus seluas mungkin supaya menambah spesialisasi dan setelahnya dapat menampung hasil produksi sehingga perdagangan Internasional menarik perhatian.

Teori Malthus

Teori Malthus yang dapat dilihat pada karya tulisanya dalam buku '*Principles of Population*', berkembang setelah pemikiran Adam Smith (1766-1834). Menurut Thomas Robert Malthus, perkembangan ekonomi semakin baik dengan investasi dan penambahan modal yang dilakukan secara terus menerus. Investasi ini merupakan tabungan yang akan digunakan dan selalu ada, sehingga Investasi bagi negara sangat penting menurut teori ini.

Teori Harrod-Domar

Teri dari Harrod-Domar ini disebut juga dengan teori pertumbuhan, dimana menurut teori ini investasi akan menciptakan kapasitas produksi yang diiringi dengan tingginya permintaan. Investasi memiliki peran besar dan merupakan modal yang bertumbuh. Pada teori ini juga beranggapan bahwa jumlah penduduk yang besar tidak mengurangi pendapatan perkapita asalkan modal fisiknya meningkat (Mulyadi, 2003). Teori ini didukung oleh model lain yang sama yaitu model solow. Pada model ini dipakai suatu fungsi produksi yang dikenal dengan istilah *Cobb-Douglas*. Dalam Model ini berasumsi bahwa modal fisik dapat disubtitusi dengan pekerja, dan para pekerja tumbuh secara geometris. Disini sangat jelas bahwa para pekerja didefinisikan secara luas sebagai bagian dari faktor produksi, tidak hanya modal fisik dan bukan hanya sekedar pembagi (untuk memperoleh output pekerja).

Pengangguran

Permasalahan ekonomi makro salah satunya adalah pengangguran. Sejalan dengan Mankiw bahwa pengangguran berpengaruh langsung terhadap kehidupan manusia, yaitu menurunkan standar kehidupan atau kesejahteraan dan menimbulkan tekanan psikologis (Mankiw, 2007).

Athur Okun menyatakan korelasi yang negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya Athur Okun mengatakan, terdapat hubungan yang erat antara tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan distribusi pendapatan yang tidak merata. Masyarakat yang menganggur, selalu dalam kategori miskin. Sementara bagi mereka yang memiliki

pekerjaan dengan gaji yang tetap di swasta maupun pemerintah akan masuk dalam kelas menengah atau kelompok atas (Arsyad, 2015).

Teori dua sektor surplus tenaga kerja dari Athur Lewis menjelaskan mengapa pada tahap awal pembangunan terjadi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Perekonomian terbagi dalam dua sektor, yaitu sektor tradisional perdesaan dan sektor modern perkotaan. Pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan ekonomi terpusat di sektor modern perkotaan dan akan menampung kelebihan tenaga kerja dari sektortradisional perdesaan. Pada saat ini terjadi kesenjangan pendapatan antara sektor tradisional dan modern dalam waktu singkat, kemudian dalam jangka panjang akan menyempit kembali. Kesenjangan di sektor modern relatif lebih tinggi dari pada sektor tradisional yang lebih stagnan (Arsyad, 2015).

Upah Minimum

Upah minimum berdasarkan Teori Upah-Efisiensi (*efficiency-wage*), didefinisikan sebagai upah tinggi yang dapat mendorong para pekerja dapat produktif dalam melakukan kerja. Pekerja yang produktif akan meningkatkan efisiensi dan akan meningkatkan laba perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan mengurangi upah pada saat tingginya penawaran tenaga kerja akan mengurangi pengeluaran perusahaan namun akan mempengaruhi produktivitas pekerja dan kemudian akan mengurangi laba perusahaan (Mankiw, 2007).

Kekakuan Upah-Riil dalam mempengaruhi pengangguran, bisa digunakan untuk melihat mengapa upah bisa mempengaruhi kemiskinan. Karena Kegagalan upah menyesuaikan penawaran dan permintaan tenaga sehingga menyebabkan pengangguran. Ketika Upah riil yang dibayar melebihi tingkat ekuilibrium dan penawaran pekerja melebihi permintaan, juga akan menyebabkan pengangguran (Mankiw, 2007). Upah yang dibayar di bawah atau di atas ekuilibrium akan menyebabkan meningkatnya tenaga kerja yang tidak terserap. Sedangkan pengangguran adalah tidak adanya penghasilan yang bisa digunakan Oleh penduduk sehingga menyebabkan kondisi tidak berdaya dan memperburuk kondisi kemiskinan.

Teori Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang merupakan faktor produksi. Tenaga kerja manusia masih diperlukan, tanpa sumber daya manusia proses produksi tidak berjalan. Faktor produksi dalam bentuk tenaga kerja ini didefinisikan sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU. No. 3 Tahun 2003). Undang-undang ini merupakan undang-undang yang mendasari perihal peraturan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Sementara itu BPS mendefinisikan tenaga kerja dari aspek kualitas dan aspek kuantitas. Dari aspek kualitas, tenaga kerja diartikan sebagai jasa yang diberikan untuk proses produksi. Aspek kuantitas pada tenaga kerja diartikan sebagai orang atau sumber daya secara fisik yang memberikan kontribusi bagi jalannya produksi. Menurut Payaman J. Simanjuntak (2001) secara operasional tenaga kerja ada manusia yang digolongkan atau termasuk dalam usia kerja.

Produksi yang terus berkembang dan kemudahan teknologi yang terus maju telah membawa perubahan ketenagakerjaan. Saat ini, isu kemunculan artificial intelegen (AI) yang digadang akan menggantikan tenaga kerja memunculkan persoalan baru, dimana tenaga kerja manusia berdampak tergantikan oleh AI. Perusahaan yang telah menggunakan robot, atau sejenis aplikasi yang memangkas tenaga kerja dapat meningkatkan proses produksi dengan lebih baik, tetapi disisi lain akan berdampak pada meningkatnya pengangguran.

Teori Investasi

Nukse dalam Jhingan (2012) mengungkapkan bahwa modal terbentuk Ketikamasyarakat enggan atau tidak menggunakan semua aktivitas produktifitasnya dalam melakukan pembelian barang konsumsi, namun menggunakannya untuk meningkatkan manfaat produktifnya seperti membuat barang modal.

Menurut Samuelson (2004) Investasi adalah tindakan menambahkan modal atau barang dalam satu negara seperti bangunan, peralatan produksi, dan barang inventaris dalam

waktu satu tahun. Tindakan investasi ini melibatkan pengorbanan konsumsi di masa depan. Investasi adalah salah satu komponen penting dalam GNP dan memainkan peran penting dalam permintaan agregat. Namun, ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait dengan investasi. Pertama, pengeluaran investasi lebih tidak stabil dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi dan dapat menyebabkan fluktuasi yang berdampak pada resesi. Kedua, investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perbaikan produktivitas tenaga kerja. Karena pertumbuhan ekonomi bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital, investasi menjadi faktor kunci dalam memajukan perekonomian.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data Yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder Yang diperoleh dari publikasi BPS Nasional, BPS Kalimantan Barat dan BPS Kabupaten/Kota selama enam tahun yaitu tahun 2011 – 2021. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) yaitu tingkat Upah minimum di kabupaten perbatasan dan pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2011 - 2021 (UM1it), Penanaman Modal Dalam Daerah (PMDN) di kabupaten perbatasan dan pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2011- 2021 (PMDN2it), Belanja Modal di kabupaten perbatasan dan pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2011 - 2021 (BM3it). Sedangkan Variabel Intervening (penghubung) yaitu Tingkat Pengangguran di kabupaten perbatasan dan pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2011 - 2021 (PGN1t) dan variabel dependen (terikat) yaitu Pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan dan pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Periode tahun 2011 - 2021 (PEit2). Sementara itu, analisis yang digunakan adalah analisis path pada data panel.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Path Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Model I Regresi Data Panel Kabupaten Perbatasan

Untuk memastikan analisis model yang tepat pada data panel digunakan tes Chow, tes Hausman, dan tes Lagrange Multiplier. Fungsi tes ini untuk menentukan apakah model lebih tepat digunakan metode CEM (*Common Effect Model*), FEM (*Fixed Effect Model*), atau REM (*Random Effect Model*). Manfaat dari pengujian ketepatan model yang akan ditetapkan dapat merungkingkan untuk memvalidasi apakah model tersebut cocok untuk digunakan dalam kondisi tertentu dan memberikan hasil yang dapat diandalkan, uji ini bermanfaat untuk menguji ketepatan model dan hasilnya dapat digunakan untuk memperbaiki model, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih baik.

Tes Chow disimpulkan jika peluang hasil tes lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan model CEM, jika peluang hasil test lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan model FEM. Hasil pengujian tes Chow melalui eviews 12 dengan nilai probability sebesar $0,0000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa model FEM sebagai pilihan yang tepat.

Tes Hausman dilakukan untuk memilih model yang tepat diantara FEM dan REM. Kriteria uji jika peluang hasil uji lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan model adalah REM, jika peluang hasil uji lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan model adalah FEM. Hasil uji sebesar $0,0227 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa model adalah FEM.

Dari kedua tes model, disimpulkan bahwa FEM adalah teknik pendekatan yang tepat untuk model persamaan I sesuai dengan data penelitian sehingga selanjutnya analisis FEM menjadi alat menganalisis yang tepat untuk mencari nilai besarnya pengaruh parsial maupun simultan dari variabel UMK, PMDN dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

Uji Normalitas penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera. Kriterianya adalah jika nilai probability dari sebaran residual lebih besar dari 0,05 maka data dikatakan normal atau nilai Jarque-Bera data residual regresinya kurang dari 2 maka data dikatakan normal. Dan

sebaliknya jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari 2 mungkin normal atau tidak tetapi nilai probabilitas data residunya jika kurang dari 0,05 maka distribusi data bersifat tidak normal normal.

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada residu yang telah distandarkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah $5,72 > 2$ atau nilai probabilitas adalah $0,057 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residu bersifat normal. Artinya pengaruh UMK, PMDN, dan Belanja Modal, terhadap Tingkat Pengangguran memenuhi asumsi data normal.

Kriteria uji multikolinearitas dengan mengkorelasikan antar variabel bebasnya adalah jika hasil koefisien korelasi Pearson kurang dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas, dan sebaliknya jika lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2004). Nilai-nilai koefisien korelasi Pearson dari $UM_{1it} - PMDN_{2it}$, $UM_{1it} - BM_{3it}$, dan $PMDN_{2it} - BM_{3it}$ lebih kecil dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di dalam model persamaan I. Artinya tidak terjadi korelasi kuat antara UMK, PMDN, dan Belanja Modal didalam mempengaruhi Tingkat Pengangguran.

Nilai probabilitas uji Gletjer pada masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residunya masing-masing lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel bebas. Artinya tidak terjadi keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari error untuk semua pengamatan pada UMK, PMDN maupun Belanja Modal, terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.

Diketahui bahwa banyaknya elemen *cross-section* sebesar $T = 45$, dengan variabel bebas $k = 4$, maka berdasarkan Tabel Dubir-Watson diketahui $dl = 1,383$, $du = 1,666$, hasil perhitungan $D = 1,399$, $4-du = 2,333$, $4-dl = 2,6168$ maka letak nilai Dubir-Watson yaitu $1,383 < 1,399 < 1,666$, dan $D > dl$ atau $1,399 > 1,383$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi negatif, dan tidak bisa disimpulkan tentang autokorelasi positif.

Tabel 1 Hasil Analisis FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability	Kesimpulan
C	0,646405	5,801724	0,111416	0,9119	-
UM _{1it}	1,124782	0,460053	2,444898	0,0194	UM _{1it} berpengaruh terhadap PGN _{it1}
PMDN _{2it}	0,054493	0,059309	0,918797	0,3642	PMDN _{2it} tidak berpengaruh terhadap PGN _{it1}
BM _{3it}	-0,788428	0,567387	-1,389577	0,1730	BM _{3it} tidak berpengaruh terhadap PGN _{it1}

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Hasil perhitungan analisis FEM pada Tabel 4.26 diketahui yang berpengaruh signifikan dan positif adalah upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat pengangguran, sementara PMDN atau Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Besarnya pengaruh UMK adalah sebesar 1,125. Terlihat pengaruhnya kecil tetapi analisis FEM membuktikan signifikan. Ini membuktikan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi faktor upah minimum, semakin tinggi UMK maka semakin tinggi juga tingkat pengangguran, dan semakin rendah UMK maka akan diikuti semakin kecilnya pengangguran. Sementara itu, semakin tinggi PMDN belum tentu diikuti oleh tingginya Tingkat Pengangguran, sama halnya tingginya Belanja Modal belum tentu diikuti oleh tingginya Tingkat Pengangguran. Dengan demikian hipotesis dapat dijawab bahwa

1. H₁ diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. H₂ ditolak yaitu PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. H₃ ditolak yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai *R-squared* yang didapat adalah sebesar 0,409. Untuk mengetahui nilai *R-squared* memiliki pengaruh signifikan atau tidak, dilihat dari nilai probability dari uji F, dari hasil uji Fstatistik sebesar 3.672777 dengan probabilitas sebesar 0.004147 lebih kecil dari 0,05 maka disimpulkan bahwa *R-squared* bersifat signifikan. Peneliti memilih menggunakan *R-squared* karena lebih *robust* (tidak bias) dibandingkan nilai *Adjusted R-squared*. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh bersamaan adalah sebesar $R = \text{akar kuadrat } R\text{-squared} = \sqrt{0,409}$

= 0,639 atau sebesar 63%. Secara parsial PMDN dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran, tetapi secara bersamaan UMK, PMDN, dan Belanja Modal ternyata berpengaruh terhadap Tingkat Pengangguran pada Kabupaten Pesisir Kalimantan Barat.

Koefisien residu adalah besarnya pengaruh variabel lain diluar model persamaan I. Residual ini ditentukan dengan cara mengurangkan nilai aktual dari data dari nilai yang diharapkan dari model regresi. Rumusnya adalah $Pe_1 = \sqrt{(1 - R_1^2)}$ sehingga dapat ditunjukkan bahwa $Pe_1 = \sqrt{1 - 0,409} = 0,768$ atau 76% variabel lain sangat kuat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Variabel lain ini tidak termasuk dalam penelitian. Misalnya adalah tingkat kemiskinan, IPM, atau lainnya yang perlu diteliti kembali secara terpisah diluar penelitian ini.

Model II Regresi Data Panel Kabupaten Perbatasan

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian, maka model kedua penelitian ini adalah Model persamaan II berikut:

$$PE_{it2} = C_1 + \beta_4UM_{1it} + \beta_5PMDN_{2it} + \beta_6BM_{3it} + \beta_7PGN_{it1} + \varepsilon_{it2}$$

Model ini diartikan sebagai estimasi atas pengaruh UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Model persamaan ini juga perlu dilakukan kecocokan pendekatan model regresi, oleh karena itu perlu dilakukan uji Chow, uji Hausman, maupun Uji Lagrange Multiplier.

Hasil pengujian tes Chow diketahui bahwa nilai probability adalah $0,0154 < 0,05$ disimpulkan bahwa model lebih tepat FEM diantara CEM dan FEM. Uji Chow menyimpulkan agar menggunakan FEM dalam menganalisa model regresi persamaan II. Diketahui bahwa nilai probability hasil pengujian Hausman sebesar $0,0294 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa model tepatnya adalah FEM diantara pilihan FEM dan REM. Dengan demikian tidak perlu dilakukan lagi uji Lagrange Multiplier untuk memilih antara REM atau CEM yang tepat sebagai model estimasi persamaan regresi, karena dua uji membuktikan FEM.

Untuk mengetahui apakah hasil regresi tersebut tidak bias, perlu dilakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pada uji normalitas, nilai Jarque-Bera sebesar $1,86 < 2$ atau probability sebesar $0,394 > 0,05$ maka dapat disimpulkan residu data regresi bersifat normal. Pada uji multikolinearitas hasil koefisien korelasi Pearson kurang dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Pada uji heteroskedastisitas, nilai peluang dari regresi variabel bebas terhadap nilai absolut residu regresi FEM adalah masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel bebas tersebut. Sedangkan pada uji autokorelasi, dengan tes Durbin-Watson didapat bahwa nilai statistik Durbin-Watson sebesar 1,976. Dengan $T = 32$, $k = 5$, maka dari Tabel Dubir-Watson didapat nilai $dl = 1,176$, $du = 1,732$, $D = 1,976$, $4-du = 2,268$, $4-dl = 2,824$, $4-D = 2,024$. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas.

Sesuai dengan kesimpulan diatas bahwa FEM adalah model yang tepat untuk mengestimasi persamaan II maka dilakukan analisis FEM dengan hasil berikut:

Tabel 2 Hasil Regresi FEM Persamaan II

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Probability	Kesimpulan
C	6,106095	2,330186	2,620432	0,0153	-
UM _{1it}	0,104721	0,216554	0,483577	0,6333	UM _{1it} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}
PMDN _{2it}	0,017157	0,026253	0,653520	0,5199	PMDN _{2it} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}
BM _{3it}	-0,289418	0,245787	-1,177515	0,2510	BM _{3it} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}
PGN _{it1}	-0,209279	0,103467	-2,022660	0,0549	PGN _{it1} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Tabel 4.33 menunjukkan bahwa nilai probability hasil uji t pada variabel UM_{1it} sebesar $0,633 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa UM_{1it} tidak berpengaruh signifikan terhadap PE_{it2} artinya bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada Belanja modal didapat probability sebesar $0,519 < 0,05$ maka juga disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara PMDN dan Tingkat Penganguran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai hipotesis penelitian bahwa

1. H_4 diterima dimana UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
2. H_5 ditolak dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
3. H_6 ditolak dimana Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.
4. H_7 ditolak dimana Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten perbatasan provinsi Kalimantan Barat.

Hasil analisis regresi dengan pendekatan FEM pada persamaan II didapat nilai *R-squared* sebesar 0,4999. Nilai F statistic sebesar 2,87 dengan nilai probabilitas sebesar $0,0225 < 0,05$ maka nilai *R-squared* signifikan.

Demikian dapat disimpulkan UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Besarnya pengaruh bersamaan adalah akar kuadrat dari *R-squared* ditulis $\sqrt{R^2}$ yaitu 0,70 atau 70%.

Diketahui bahwa pengaruh simultan UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 44%. Dan secara parsial UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Koefisien model II ini adalah $Pe_2 = \sqrt{(1 - R_2^2)}$ sehingga nilai $Pe_2 = \sqrt{(1 - 0,4999)} = 0,707$ atau 70%. Jadi besarnya variabel lain diluar model persamaan II adalah sebesar 70% ini artinya begitu besar pengaruh variabel luar atau variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian.

Hasil analisis diketahui bahwa penggabungan model persamaan I dan model persamaan II menghasilkan jalur dengan variabel independent. Pada model dimana UMK,

PMDN, Belanja Modal, dan variabel interveningnya: Tingkat Pengangguran, dan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi.

Disebabkan tidak berpengaruhnya tingkat pengangguran (PGN_{it1}) terhadap pertumbuhan ekonomi (PE_{it2}). Untuk menguji pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini menggunakan uji sobel. Uji Sobel digunakan untuk mengetahui apakah Tingkat Pengangguran dapat memediasi pengaruh UMK, PMDN, Belanja Modal, terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Uji Sobel adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan mediasi antara dua variabel dalam suatu model. Uji ini digunakan untuk menguji apakah suatu variabel independen (X) mempengaruhi suatu variabel dependen (Y) melalui suatu variabel mediasi (M).

Tabel 3 Hasil Uji Sobel

Variabel	A	Sa	B	Sb	Z	T Tabel	Kesimpulan
UMK	1,124	0,460	-	-	-1,561	1,703	Tidak signifikan
PMDN	0,05	0,059	-	-	-0,782	1,703	Tidak signifikan
Belanja Modal	-0,788	0,567			1,147	1,703	Tidak signifikan
Tingkat Pengangguran	-	-	-0,209	0,103			

Sumber: Olah Data Eviews, 2022

Kolom A adalah nilai koefisien regresi bagi UMK, PMDN, dan Belanja Modal, Sa adalah standar error pengaruh UMK, PMDN, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Pengangguran, B adalah nilai koefisien regresi Tingkat Pengangguran dan Sb adalah standar error pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil yang menunjukkan nilai t-hitung, disiapkan nilai T Tabel dan kolom kesimpulan. T table dengan observasi sebanyak 32 dan variabel sebanyak 5 maka $df=32-5=27$ maka nilainya adalah 1,703.

1. Hasil hitung uji Sobel pengaruh tidak langsung UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $-1,561 < 1,703$, maka UMK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
2. Pengaruh tidak langsung PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $-0,782 < 1,703$, maka PMDN tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.

3. Pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $1,147 < 1,703$, maka Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa Tingkat Upah Minimum Kabupaten (UMK) di kabupaten perbatasan maupun di kabupaten pesisir provinsi Kalimantan Barat berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat pengangguran. Semakin tinggi upah maka akan berdampak pada perubahan semakin tingginya tingkat pengangguran. Di Kabupaten Perbatasan Kalimantan Barat, hal ini disebabkan oleh biaya produksi yang akan meningkat bagi sektor formal. Pada sektor formal terjadi pengurangan tenaga kerja, sementara dorongan bagi masyarakat semakin tinggi untuk bekerja, jumlah tenaga kerja semakin bertambah, tetapi persaingan terjadi, pekerja yang *skill* rendah akan tersingkir, lambat laun dalam kondisi tertentu pengangguran akan bertambah.

Sementara jika upah minimum rendah, maka dampaknya permintaan (*demand*) tenaga kerja di masyarakat akan bertambah, dan supply tenaga kerja akan berkurang, terjadi juga imbas kegiatan ekonomi dari sektor formal kepada sektor informal, tenaga kerja akan berkurang menyebabkan pengangguran berkurang di masyarakat. Upah minimum yang rendah di kabupaten perbatasan dan pesisir provinsi Kalimantan Barat menyebabkan permintaan (*demand*) akan tenaga kerja akan bertambah, sehingga menyebabkan penawaran (*supply*) tenaga kerja menjadi rendah, menjadikan tingkat pengangguran akan turun.

Dari sisi penawaran (*supply*) tenaga kerja yang tinggi di kabupaten perbatasan maupun pesisir ini disebabkan investasi yang masih kecil, lapangan pekerjaan di sektor formal seperti pertambangan, perkebunan, masih terbatas dalam permintaan tenaga kerja. Di masyarakat penyediaan tenaga kerja akan tinggi karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, pendatang dari luar, serta dorongan karena upah yang tinggi. Dengan upah yang tinggi di masyarakat dan kebiasaan masyarakat yang cenderung konsumtif, investasi yang kurang, serta pendidikan yang tidak sesuai dengan lapangan kerja akan menyebabkan angka pengangguran ikut naik.

Alasan kenapa terjadi peningkatan upah minimum yang diiringi dengan peningkatan tingkat pengangguran di perbatasan dan pesisir Kalimantan Barat:

- 1) Jika tingkat upah minimum diatur rendah, maka pekerja akan mendapatkan upah yang minim, sehingga daya beli mereka akan berkurang. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran konsumsi menurun, sehingga permintaan terhadap barang dan jasa pun menurun. Akibatnya, perusahaan-perusahaan di perbatasan maupun pesisir Kalimantan Barat yang ada mungkin akan mengurangi produksi mereka dan akhirnya memangkas jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini, tingkat pengangguran dapat meningkat.
- 2) Di sisi lain, jika tingkat upah minimum diatur tinggi, pekerja akan mendapatkan upah yang lebih besar sehingga daya beli mereka akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga perusahaan-perusahaan di perbatasan maupun pesisir Kalimantan Barat mungkin akan meningkatkan produksi mereka dan akhirnya menambah jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dalam hal ini, tingkat pengangguran dapat berkurang.
- 3) Selain itu, tingkat upah minimum yang tinggi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan memperkuat pasar tenaga kerja.
- 4) Dampak terasa pada tenaga kerja dengan skill rendah.

Secara keseluruhan, tingkat upah minimum dapat mempengaruhi tingkat pengangguran dari aspek masyarakat karena adanya hubungan yang erat antara upah dan tingkat konsumsi masyarakat. Jika upah minimum diatur rendah, maka konsumsi masyarakat menurun dan permintaan tenaga kerja pun menurun. Sedangkan jika upah minimum diatur tinggi, maka konsumsi masyarakat meningkat dan permintaan tenaga kerja pun meningkat.

Menurut Hohberg And Lay (2015), dalam penelitiannya terkait dengan efek dari upah minimum terhadap sektor formal dan informal di Indonesia. Pengaruh upah minimum terhadap

kondisi tenaga kerja di Indonesia memiliki efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal walupun dalam jumlah yang relatif kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum memiliki efek yang positif terhadap meningkatnya rata-rata upah bagi pekerja di sektor formal, sementara menunjukan hasil yang tidak signifikan dalam mempengaruhi rata-rata upah di sektor informal di masyarakat. Termasuk sektor formal adalah BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Maupun Koperasi, sementara sektor informal adalah usaha kecil yang tidak memiliki perizinan.

Investasi dalam berbagai bentuknya akan memberikan banyak pengaruh kepada perekonomian suatu negara ataupun dalam cakupan yang lebih kecil yakni masyarakat di daerah. Karena dengan terciptanya investasi akan membawa suatu negara pada kegiatan ekonomi tertentu. Namun untuk di kabupaten perbatasan maupun pesisir Kalimantan Barat PMDN dalam jangka pendek tidak terjadi karena terdapat faktor lain yaitu: struktur pasar tenaga kerja dimana sektor formal hanya menampung tenaga kerja dengan *skill* yang baik dalam kualifikasi tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan global dalam ekonomi. Struktur tenaga kerja ketika terdapat surplus tenaga kerja yang tersedia di pasar. Dalam situasi ini, meskipun ada penanaman modal baru yang menciptakan lapangan kerja baru, tingkat pengangguran mungkin tidak turun secara signifikan karena ada jumlah tenaga kerja yang lebih besar daripada yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Selain itu, ketika ada kualifikasi tenaga kerja yang tidak cocok dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan di kabupaten perbatasan maupun pesisir, maka penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Proyek-proyek PMDN di kabupaten perbatasan dan pesisir Kalimantan Barat dimungkinkan tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal, tenaga kerja lokal sebagian besar lebih banyak di sektor informal, pada jenis usaha kecil yang mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tertentu, produk sebagian besar tidak ada (produksi) di kabupaten-kabupaten ini, harus pesan ke luar kabupaten. Misalnya job pemesanan baju, pembuatan mebeulair, bahan bangunan, semuanya harus membeli di luar kabupaten. Dari sisi produksi

di masyarakat masih terbatas sehingga kegiatan sektor informal masih terpenuhi dari luar kabupaten, karena di kabupaten tidak ada, sehingga pengangguran sama sekali tidak terpengaruhi oleh PMDN yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa PMDN dapat berupa investasi penyertaan modal pada BUMD, perlindungan sumber daya alam, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi, pembangunan infrastruktur oleh perusahaan dalam negeri, pembukaan cabang bisnis perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan perusahaan asing dimana ada sebagian modal dalam negeri, misalnya perkebunan, peternakan, dan lain-lain. PMDN ini dapat berupa perorangan, badan usaha berbentuk hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dan pada realitasnya tidak semua investasi dalam negeri ini dapat menyerap tenaga kerja secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muniroh (2020) bahwa di daerah Banten pada pada jangka pendek 2015-2019 menunjukkan PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Untuk Kalimantan Barat di kabupaten perbatasan maupun pesisir, berdasarkan data BPS, PMDN di Kalimantan Barat sebagian besar pada sektor primer yaitu: 1) Tanaman pangan, perkebunan dan peternakan; 2) Kehutanan; 3) Perikanan, dan 4) Pertambangan, yang semuanya adalah investasi padat modal. Dan pada sektor sekundernya sebagian besar pada sektor makanan, industri kimia dan farmasi, industri kayu, karet dan plastik. Sektor tersiernya pada perdagangan dan reparasi, hotel, konstruksi, transportasi, gudang, dan telekomunikasi (BPS, 2022).

Belanja modal sebagai bentuk investasi sektor publik merupakan salah satu cara dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, karena disamping memberikan efek langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui implementasi program-program padat karya, juga secara tidak langsung melalui pengembangan aktivitas ekonomi bagi perusahaan (Keynes dalam Pressman, 2006).

Peningkatan porsi alokasi belanja modal di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir ini diharapkan mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan diikuti oleh penurunan kemiskinan dan pengangguran. Penelitian Hartati (2012), menemukan

bahwa peningkatan belanja modal mampu mendorong terjadinya pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yaitu pertumbuhan yang mampu menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan (*pro job dan pro poor*). Namun demikian belanja modal justru dapat meningkatkan tingkat kemiskinan jika terjadi sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kotambunan (2016), yang menemukan bahwa belanja modal pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan dimana semakin besar jumlah belanja modal justru meningkatkan tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Utara. Kenapa bisa begitu, karena belanja faktor kemiskinan tidak diperhitungkan, alokasi APBD untuk penanganan kemiskinan jumlahnya kecil.

Tidak ada pengaruhnya belanja modal terhadap tingkat pengangguran di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir Kalimantan Barat ini juga sejalan dengan penelitian Wulansari dkk (2014), yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten/Kota pada Provinsi Sumatera Utara. Ini artinya belanja modal kabupaten perbatasan dan pesisir Kalimantan Barat lebih memperlihatkan kemampuan pemerintahnya melakukan pembelian aset-aset namun sifatnya belum tentu dapat mengurangi pengangguran.

Tingkat pengangguran di kabupaten perbatasan maupun pesisir tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian. Pengangguran yang tinggi dapat memiliki efek negatif pada pertumbuhan ekonomi karena dapat menyebabkan penurunan permintaan dan produktivitas (Ronaldo, 2019). Ketika tingkat pengangguran tinggi, di masyarakat lebih banyak orang tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan, sehingga konsumsi dan belanja mereka menurun. Tetapi ini tidak terjadi di kabupaten perbatasan Kalimantan Barat secara empiris. Faktor penyebabnya adalah masyarakat lebih dominan dalam kegiatan sektor informal, seperti usaha sendiri walaupun kecil, bertani, berkebun, usaha mikro lainnya.

Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari daya beli masyarakat saja, tetapi daya produksi perusahaan. Sektor formal yang bergerak pada bidang perkebunan dan

pertambangan yang menyebar di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir telah meningkatkan GDP tetapi hanya sebagian masyarakat yang bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Namun dalam jangka panjang pertumbuhan yang didukung oleh adanya perusahaan-perusahaan besar di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir akan membuat keseimbangan, permintaan akan tenaga kerja.

Analisis Path Kabupaten Pesisir Provinsi Kalimantan Barat

Model I Regresi Data Panel Kabupaten Pesisir

Hasil Hasil pengujian tes Chow melalui *evIEWS* 12 dengan nilai probability sebesar $0,0000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa model FEM sebagai pilihan yang tepat. Selanjutnya dilakukan tes Hausman untuk mengetahui apakah model FEM atau REM yang cocok diantara kedua model ini. Peluang hasil uji pada tes Hausman sebesar $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa model adalah FEM.

Berdasarkan hasil uji Jarque-Bera pada residu yang telah distandarkan bahwa nilai Jarque-Bera adalah $1,834 < 2$ atau nilai probability adalah $0,399 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residu bersifat normal. Artinya pengaruh UMK, PMDN, dan Belanja Modal, terhadap Tingkat Pengangguran data panel kabupaten pesisir memenuhi asumsi.

Pada tes multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai-nilai koefisien korelasi Pearson dari $UM_{1it} - PMDN_{2it}$, $UM_{1it} - BM_{3it}$, dan $PMDN_{2it} - BM_{3it}$ lebih kecil dari 0,8 maka disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas di dalam model persamaan I. Artinya tidak terjadi korelasi kuat antara UMK, PMDN, dan Belanja Modal pada data panel Kabupaten pesisir Kalimantan Barat didalam mempengaruhi Tingkat Pengangguran.

Nilai probability uji Gletjer pada masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut residunya masing-masing lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel bebas.

Diketahui bahwa banyaknya elemen *cross-section* sebesar $T = 40$, dengan $k = 4$, maka berdasarkan Tabel Dubir-Watson diketahui $dl = 1,338$, $du = 1,658$, hasil perhitungan $D = 2,483$, $4-du = 2,342$, $4-dl = 2,662$, $4-d = 1,517$ maka letak nilai Dubir-Watson yaitu $1,338 < 1,517 > 1,658$, artinya $D > du$, dan $4-d < dl$ sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif.

Tabel 4 Hasil Analisis FEM

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability	Kesimpulan
C	-3,337572	1,918755	-1,739447	0,0916	-
UM _{1it}	0,411724	0,131696	3,126322	0,0038	UM _{1it} berpengaruh terhadap PGN _{it1}
PMDN _{2it}	0,007700	0,027167	0,283433	0,7787	PMDN _{2it} tidak berpengaruh terhadap PGN _{it1}
BM _{3it}	-0,047828	0,043287	-1,104902	0,2774	BM _{3it} tidak berpengaruh terhadap PGN _{it1}

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Kesimpulannya bahwa yang berpengaruh signifikan dan positif adalah upah minimum kabupaten (UMK) terhadap tingkat pengangguran, sementara PMDN atau Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan demikian hipotesis dapat dijawab berdasarkan data kabupaten pesisir provinsi Kalimantan Barata sebagai berikut:

1. H_1 diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
2. H_2 ditolak yaitu PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.
3. H_3 ditolak yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran pada kabupaten pesisir di Provinsi Kalimantan Barat.

Nilai probabilitas yang didapat sebesar $0,000094 < 0,05$ maka pengaruh simultan UMK, PMDN, Belanja Modal terhadap Pengangguran signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa besarnya pengaruh bersamaan adalah sebesar akar kuadrat dari 0,583 yaitu 0,76 atau sebesar 76%. Dari model I kabupaten pesisir didapat nilai koefisien residu sebesar $Pe_1 = \sqrt{(1 - R_1^2)}$ sehingga dapat ditunjukkan bahwa $Pe_1 = 0,64$ atau 64% variabel lain sangat kuat

berpengaruh terhadap tingkat pengangguran pada model I kabupaten pesisir. Variabel lain ini tidak termasuk dalam penelitian.

Model II Regresi Data Panel Kabupaten Pesisir

Model II pada kabupaten pesisir memiliki persamaan yang sama pada model II kabupaten perbatasan, yaitu:

$PE_{it2} = C_1 + \beta_4UM_{1it} + \beta_5PMDN_{2it} + \beta_6BM_{3it} + \beta_7PGN_{it1} + \varepsilon_{it2}$, model ini diartikan sebagai estimasi atas pengaruh UMK, PMDN, Belanja Modal, Tingkat Pengangguran, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir provinsi Kalimantan Barat.

Hasil pengujian tes Chow diketahui bahwa nilai probability adalah $0,0003 > 0,05$ disimpulkan bahwa model lebih tepat CEM diantara CEM dan FEM. Uji Chow menyimpulkan agar menggunakan FEM dalam menganalisa model regresi persamaan II. Hasilnya adalah CEM maka selanjutnya dibandingkan dengan REM, menggunakan uji Lagrange Multiplier. Diantara pilihan CEM dan REM harus dipilih mana yang lebih tepat. Nilai peluang dari Breusch-Pagan pada data panel sebesar $0,2305 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa CEM lebih tepat diantara pilihan FEM dan REM.

Seperti uji asumsi klasik sebelumnya, agar memenuhinya peneliti melakukan tranformasi data dalam bentuk logaritma, sehingga persamaan pada model II yaitu:

$$\text{Log } PE_{it2} = C_1 + \beta_4 \log(UM_{1it}) + \beta_5 \text{Log}(PMDN_{2it}) + \beta_6 \text{Log}(BM_{3it}) + \beta_7 \text{Log}(PGN_{it1}) + \varepsilon_{it2}.$$

Nilai Jarque-Bera sebesar $0,206 < 2$ atau probability sebesar $0,901 > 0,05$ maka dapat disimpulkan residu data regresi bersifat normal.

Hasil uji multikolieritas didapat bahwa korelasi antar variabel nilai koefisien korelasinya kurang dari 0,8, maka disimpulkan semua korelasi tidak terjadi multinkolinearitas.

Hasil uji heterokedastisitas ditunjukkan bahwa semua nilai probabilitas variabelnya 0,4569; 0,6830; 0,5760, 0,2220 lebih dari 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas pada variabel bebas tersebut.

Hasil uji autokorelasi dengan tes Durbin-Watson didapat bahwa nilai statistik Durbin-Watson sebesar 0,576. Dengan $T = 30$, $k = 5$, maka dari Tabel Durbin-Watson didapat nilai $d_l = 1,1426$, $d_u = 1,738$, $D = 0,576$, $4-d_u = 2,262$, $4-d_l = 2,857$, $4-d = 3,424$. Posisi koefisien Durbin-Watson berada di $D < d_l$, $4-d > d_u$. Dengan demikian disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif dan tidak terjadi autokorelasi negatif.

Sesuai dengan kesimpulan diatas bahwa CEM adalah model yang tepat untuk mengestimasi persamaan II maka dilakukan analisis CEM dengan hasil berikut:

Tabel 5 Hasil Regresi CEM Persamaan II

Variable	Coefficient	Std, Error	t-Statistic	Probability	Kesimpulan
C	5,176645	1,185460	4,366782	0.0002	-
UM _{1it}	-0,252559	0,078838	-3,203517	0,0037	UM _{1it} berpengaruh terhadap PE _{it2}
PMDN _{2it}	0,006300	0,009042	0,696809	0,4924	PMDN _{2it} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}
BM _{3it}	0,010417	0,017682	0,589088	0,5611	BM _{3it} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}
PGN _{it1}	-0,059963	0,102252	-0,586430	0,5628	PGN _{it1} tidak berpengaruh terhadap PE _{it2}

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Hanya UM_{1it} atau UMK yang berpengaruh positif terhadap PE_{it2} atau tingkat pertumbuhan ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat. Persamaan yang terbentuk adalah $\text{Log PE}_{it2} = C_1 + \beta_4 \text{Log}(UM_{1it}) + \beta_5 \text{Log}(PMDN_{2it}) + \beta_6 \text{Log}(BM_{3it}) + \beta_7 \text{Log}(PGN_{it1}) + \varepsilon_{it2}$

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai hipotesis penelitian bahwa

1. H₄ diterima dimana UMK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
2. H₅ ditolak dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
3. H₆ ditolak dimana Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
4. H₇ ditolak dimana Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.

Hasil analisis regresi dengan pendekatan CEM pada persamaan II didapat nilai *R-squared* sebesar 0,299, besarnya pengaruh adalah akar kuadrat dari 0,299 yaitu 0,546 atau

54,6 %. Tetapi karena nilai probabilitas hasil perhitungan sebesar $0.055143 > 0,05$ maka pengaruh simultan atau bersamaan UMK, PMDN, Belanja Modal dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan. Hasil koefisien residu dari analisis model II kabupaten pesisir didapat sebesar $Pe_2 = \sqrt{(1 - R_2^2)}$ atau $Pe_2 = \sqrt{(1-0,299)} = 0,837$ atau 83,7%. Koefisien residu dihitung untuk mencari nilai besarnya pengaruh variabel bebas lainnya diluar penelitian atau diluar persamaan II. Dengan mengetahui nilai koefisien residu ini dapat diartikan pengaruh variabel lain dalam model II, dan ini diluar penelitian ini.

Hasil analisis parsial telah disimpulkan bahwa

1. H_1 diterima yaitu UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
2. H_2 ditolak yaitu PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
3. H_3 ditolak yaitu Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
4. H_4 diterima dimana UMK berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
5. H_5 ditolak dimana PMDN tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
6. H_6 ditolak dimana Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.
7. H_7 ditolak dimana Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten pesisir Kalimantan Barat.

Tabel 6 Hasil Uji Sobel

Variabel	A	Sa	B	Sb	Z	T Tabel	Kesimpulan
UMK	0,411	0,1317	-	-	-0,577	1,708	Tidak signifikan
PMDN	0,007	0,0271	-	-	-0,236	1,708	Tidak signifikan
Belanja Modal	-0,0478	0,0432	-	-	0,519	1,708	Tidak signifikan
Tingkat Pengangguran	-	-	-0,06	0,1022			

Sumber: Olah Data Eviews, 2022

Hasil perhitungan uji sobel pada analisis jalur data panel kabupaten pesisir Kalimantan Barat. Didapatkan bahwa mediasi tingkat pengangguran tidak signifikan pada UMK, PMN maupun Belanja Modal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi. T table dengan observasi sebanyak 30 dan variable sebanyak 5 maka $df=30-5=25$ maka nilainya adalah 1,708.

1. Hasil hitung uji Sobel pengaruh tidak langsung UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $-0,577 < 1,708$, maka UMK tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
2. Pengaruh tidak langsung PMDN terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $-0,236 < 1,708$, maka PMDN tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.
3. Pengaruh tidak langsung Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran dibuktikan dengan $0,519 < 1,708$, maka Belanja modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Tingkat Pengangguran.

Hasil analisis regresi berganda membuktikan bahwa pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan nilainya negatif dan tidak signifikan. Demikian juga hasil perhitungan pada kabupaten pesisir dimna bernilai kecil tidak signifikan.

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian. Hal ini juga telah dibuktikan oleh Romi, dkk (2021) dimana telah menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Minahasa dalam rentang waktu 2009-2018. Artinya bahwa kemampuan keuangan pemerintah yang diaplikasikan dalam belanja modal hanya sebagian kecil realisasi belanja secara otonom oleh kabupaten tanpa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pemerintah membeli aset tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Romer, C.D. dan Romer, David H. (2007) menunjukkan hasil penelitiannya belanja pemerintah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara langsung tanpa harus melalui pengurangan pengangguran. Penelitian tersebut menemukan bahwa peningkatan belanja pemerintah 1% dapat meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sebesar 2,5%. Artinya tingkat pengangguran tidak signifikan menjadi variabel perantara.

SIMPULAN

Tingkat Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Kenaikan 1% Tingkat Upah Minimum akan berdampak meningkatnya Tingkat Pengangguran sebesar 1,124 untuk kabupaten perbatasan, dan 0,411 untuk kabupaten pesisir.

Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh disebabkan struktur pasar tenaga kerja yang menjadi kendala, tingkat kualifikasi tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal seperti perubahan global dalam ekonomi.

Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Belanja modal pemerintah kabupaten perbatasan maupun pesisir tidak selamanya dapat menurunkan tingkat pengangguran disebabkan oleh belanja modal pemerintah tidak selalu diarahkan pada sektor yang membutuhkan tenaga kerja, pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menjalankan proyek-proyek belanja modal yang diinginkan untuk mengatasi tingkat pengangguran; Ketidakcocokan pasar kerja dari proyek pemerintah dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan proyek-proyek tersebut.

Tingkat Upah Minimum tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat. Upah minimum yang tinggi dapat meningkatkan biaya produksi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah tenaga kerja atau kenaikan harga produk, yang dapat mengurangi daya saing produk, terjadi pengurangan kemampuan daya beli masyarakat. Pada Kabupaten Pesisir, Tingkat Upah Minimum berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pada Kabupaten

Perbatasan kenaikan 1 % Tingkat Upah Minimum menyebabkan terjadinya penurunan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,02526.

Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. PMDN tidak berdampak bagi pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan maupun pesisir disebabkan: Infrastruktur yang buruk, seperti jalan raya; keterbatasan sumber daya manusia; regulasi yang berlebihan yang meningkatkan biaya produksi dan mengurangi fleksibilitas.

Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten perbatasan maupun pesisir belum tepat dalam membuat kebijakan fiskal, seharusnya kebijakan fiskal diawasi dengan baik agar dapat meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi.

Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat Tahun. Pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan maupun kabupaten pesisir Kalimantan Barat dipengaruhi oleh akumulasi modal termasuk sumber daya manusia (Human Capital), pertumbuhan pendudukan dan angkatan kerja, kemajuan teknologi dan sumberdaya kelembagaan termasuk perusahaan-perusahaan besar dan juga lembaga-lembaga pemerintah, sehingga jelas tidak hanya melihat dampaknya dari tingginya pengangguran.

Tingkat Upah Minimum tidak pengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui mediasi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Keadaan peningkatan produktivitas kerja diakibatkan tercukupinya tenaga kerja yang sesuai, dan upah yang tinggi.

Penanaman Modal Dalam Negeri tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui mediasi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun di Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Tidak selamanya

penurunan pengangguran yang disebabkan oleh PMDN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui mediasi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Perbatasan maupun Kabupaten Pesisir di Provinsi Kalimantan Barat. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di kabupaten perbatasan maupun pesisir tidak harus melalui penurunan tingkat pengangguran, tetapi dapat dilakukan kanal lain seperti produktivitas, kapasitas produksi, dan infrastruktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi ke-5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Kalimantan Barat dalam Angka*. Pontianak: BPS.
- BPS. (2022). *Kalimantan Barat Dalam Angka 2021*. Kalimantan Barat: BPS.
- Buana, AL., Saragih, H.J.R., & Aritongang, S. (2018) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah,, Investasi Swasta, dan Tenaga Kerja Terhadap Petumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2011-2017. *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 4(2), 1-12.
- Gujarati, D. N. (2004). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Hohberg, Maiké., Lay, Jahn. (2015). The impact of minimum wage on informal an formal labor market outcome: evidence from Indonesia. *Journal of labor & development*, 4(14), 1-25.
- Jarque, C., & Berra, A. K. (1987). A Test for Normality of Observations and Regression Residuals. *International Statistical Review*, 55(2), 163-172.
- Jayani, D.H (2019). Bank Dunia Soroti Aturan Upah Tenaga Kerja Hambat Kemudahan Berbisnis. <https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4e573f9db/bank-dunia-soroti-aturan-upah-tenaga-kerja-hambat-kemudahan-berbisnis>
- Jhingan, M.L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mankiw, N. Gregory. (2007). *Makro Ekonomi*. Edisi ke 6 Jakarta: Erlangga.
- Muhdar, HM. (2015). Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Masalah dan Solusi. *Jurnal IAIN Sultan Amai Gorontalo. Gorontalo*, 11(1), 1-10.
- Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muniroh, Mumun (2020) *Pengaruh PMA, PMDN Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2015-2019*. Diploma atau S1 thesis, tidak dipublikasikan, UIN SMH BANTEN.
- Romer, C.D. dan Romer, David H. (2007). The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks. *Working Paper, National Bureau of Economic Research*. DOI 10.3386/w13264
- Romi, D. T., Debby, C. R., George, M.V. K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(4), 79-90.
- Ronaldo, R. (2019). Pengaruh Inflasi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makro di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 137-153.
- Wulansari, R.N., Hamid A., & Rini (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *Jurnal Akuntansi Universitas Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah*, 1(1), 20-30.